

Strategi Komunikasi Publik Penanganan COVID-19 di Indonesia: Perspektif Sosiologi Komunikasi Massa dan Agama

Moch Fakhruroji,^{1*} Betty Tresnawaty,¹ A.S. Haris Sumadiria,¹ Enok Risdayah¹

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*e-mail: moch.fakhruroji@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif sosiologi komunikasi massa dan agama atas strategi komunikasi publik yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19. Dengan metode *library research* yang merujuk pada *resource* yang tersedia secara online, tulisan ini menyajikan perspektif teoretis tentang strategi komunikasi publik Pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19. Berdasarkan analisis teoretis tersebut dapat diuraikan beberapa hal. *Pertama*, tidak adanya keseragaman pemahaman tentang karakteristik wabah COVID-19 di kalangan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi kesimpangsiuran informasi. *Kedua*, sosialisasi tidak dilakukan secara efektif, hal ini terlihat beberapa kasus penolakan warga atas jenazah korban COVID-19 akibat minimnya pengetahuan mereka tentang wabah ini sehingga berpotensi memunculkan konflik horizontal. *Ketiga*, meskipun pemerintah telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), beberapa masih beraktivitas dengan alasan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kompensasi yang dijanjikan diragukan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari.

Kata Kunci:

Komunikasi publik, COVID-19, sosiologi komunikasi massa, agama, physical and distancing

PENDAHULUAN

Menutup tahun 2019, masyarakat dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yang segera menjadi persoalan global dan berdampak sangat serius pada aspek-aspek kehidupan lainnya. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menetapkan wabah pandemi global dan menyebutnya sebagai COVID-19 (coronavirus disease 2019) (WHO, 2020). Dalam waktu singkat, wabah ini kemudian menjadi pandemi dan menjalar ke seluruh dunia. Wabah itu sendiri didefinisikan sebagai penyakit berbahaya yang menyebar dengan cepat dan sering menyebabkan kematian (Emmeluth, 2005: 6). Wabah juga merupakan penyakit yang sangat serius dan dapat menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh yang disebabkan oleh organisme mikroskopis yang disebut bakteri (Hardman, 2010: 11). COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 210 negara di dunia. Setiap saat, media massa di seluruh dunia melaporkan jumlah korban yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Virus yang pertamakali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina akhir 2019 ini menyebar begitu cepat sehingga memaksa sejumlah negara untuk segera mengambil tindakan untuk memberlakukan *lockdown*, yakni dengan menutup semua akses keluar-masuk wilayah mereka, termasuk di Indonesia.

Di dunia, terdapat 2.995.244 kasus, dengan kasus sembuh 881.557 dan kasus kematian 207.009 kasus. Kasus terbanyak saat ini diduduki oleh Amerika Serikat dengan 987.322 kasus, sembuh 118.781, dan meninggal dunia 54.415. Disusul kemudian oleh Spanyol dengan 226.629 kasus, sembuh 117.727 kasus, dan meninggal dunia 23.190. Berikutnya di urutan ketiga Italia

dengan 197.675 kasus, sembuh 64.928 kasus, dan meninggal dunia. Jumlah ini menjadi pertanda bahwa virus ini menyebar dengan cepat dan pada saat para peneliti medis masih melakukan riset untuk menemukan vaksin dan obat untuk wabah ini.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak wabah ini, meskipun deteksi terhadap virus ini terbilang lambat karena memang menjadi salah satu negara yang terdampak belakangan setelah beberapa negara lain. Fakta ini sempat mencuatkan perdebatan di sejumlah kalangan termasuk para peneliti dari Harvard University dan WHO sendiri yang telah memberikan peringatan terhadap Indonesia agar segera melakukan test massal dengan tujuan untuk menekan penyebaran virus ini secepatnya. Setelah pertimbangan yang matang, Indonesia kemudian memberlakukan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara parsial maupun total untuk beberapa wilayah yang terdampak paling parah.

Sebagaimana halnya negara-negara lain yang sama-sama terdampak dan memberlakukan pembatasan aktivitas warganya, Pemerintah Indonesia juga melarang penyelenggaraan aktivitas massal dan kerumunan. Pelarangan ini tentu saja berdampak pada sejumlah aktivitas publik. Perusahaan-perusahaan ditutup; sekolah, kampus dan perkantoran juga merumahkan seluruh penghuninya; pelabuhan, bandara, stasiun, terminal dibatasi; hotel, pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis juga serupa; tempat wisata, stadion olahraga semuanya ditutup, bahkan rumah-rumah ibadah juga tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan massal yang mengundang kerumunan. Secara bertahap, pemerintah daerah juga melakukan penutupan akses jalan-jalan menuju dan dari luar kota, dan bahkan gang-gang tiap wilayah rukun warga, dikunci gembok dan dirantai disertai pemberitahuan status pembatasan aktivitas yang secara keseluruhan bertujuan untuk menekan penyebaran virus ini.

Status darurat terus diumumkan oleh sejumlah kepala daerah dari tingkat gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia. Sampai dengan 27 April 2020 pukul 13.30 WIB data resmi menyebutkan bahwa di Indonesia sudah terdapat 9.096 kasus terinfeksi corona, dengan jumlah pasien dirawat 7.180 kasus, pasien sembuh 1.151 kasus (12,65 persen), dan korban meninggal dunia 765 (8,41 persen). Jika dilihat dari kurva statistiknya, angka ini terus bertambah dan hal ini yang membuat para pemangku kebijakan harus segera mengambil tindakan strategis.

Dalam skala nasional, penanganan COVID-19 ini segera dikelola oleh Pemerintah Pusat langsung dibawah Presiden RI melalui Gugus COVID-19 yang secara berkala menyampaikan perkembangan dari waktu ke waktu. Namun beberapa pihak banyak pula yang menyangsikan akurasi data yang disampaikan tersebut karena berbeda dengan data yang dimiliki oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Keraguan publik ini antara lain disebabkan oleh strategi komunikasi publik yang dijalankan oleh Pemerintah terkesan tidak transparan dan hal ini telah disayangkan banyak pihak ketika Pemerintah masih bersikap skeptis untuk menanggulangi penyebaran virus ini di Indonesia sejak awal. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi publik yang dijalankan oleh Pemerintah terkait penanganan COVID-19 dengan menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi dan agama.

Sebagai virus yang relatif baru, kajian mengenai COVID-19 atau coronavirus mencuat ke permukaan sejak kemunculannya. Hal ini disebabkan oleh karena hampir semua negara di seluruh dunia berkepentingan untuk segera mengetahui karakteristik virus ini untuk kemudian dicari solusinya. Sebelum namanya resmi ditetapkan oleh WHO sebagai COVID-19, beberapa sarjana sempat menamainya dengan 2019-nCoV dan novel coronavirus pneumonia (NCP) (Lu et al., 2020). Negara-negara di dunia berupaya sekuat tenaga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga sebagian negara akhirnya melakukan upaya penjarakan fisik dan sosial (*social and physical distancing*) (Wilder-Smith & Freedman, 2020). Memang bukan hal baru, sebab sebelumnya pernah diterapkan di beberapa kasus serupa (Ahmed, et al., 2018;

Glass, et al., 2016). Beberapa peneliti juga mengkaji tentang pemberlakuan *lockdown* atau penghentian total aktifitas manusia di ruang publik dengan menutup akses transportasi dan pintu keluar-masuk kota atau negara terkait pandemi ini (Lin et al., 2020; Roosa et al., 2020). Ada pula yang mengkaji tentang upaya pemerintah dengan mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk pembelian alat kesehatan dan membiayai rumah sakit dan laboratorium untuk melakukan riset (Zhang & Liu, 2020).

Kajian lainnya terkait COVID-19 juga mencakup tentang penanganan COVID-19 terhadap pasien manula (Elston, 2020), penggunaan teknologi digital dalam menyasati pandemi global (Razai, et al., 2020) dan bagaimana upaya meminimalkan dampak ekonomi, politik dan keamanan negara dalam situasi pandemi (Gallego, et al., 2020) serta beberapa kajian lainnya. Kajian-kajian tentang COVID-19 seolah menjadi episentrum peradaban ilmu pengetahuan karena kedaruratannya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kajian terkait dengan COVID-19 lebih banyak dalam perspektif medis dan kesehatan, sementara kajian yang secara khusus mengulas tentang konsekuensi sosio-kultural dari wabah ini belum banyak dilakukan.

Oleh sebab itu, kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implikasi-implikasi sosio-kultural yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 yang telah mengubah siklus kehidupan sosial sehari-hari. Munculnya kebijakan pembatasan aktivitas di ruang publik telah berdampak pada banyak sektor; ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan agama. Komunikasi publik terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu indikator bagi proses penanganan penyebaran virus ini. Dengan kata lain, jika masyarakat dapat memahami dengan baik proses komunikasi publik yang dijalankan oleh pemerintah—termasuk berbagai konsekuensi tindakan yang diambil, maka masyarakat akan menjalankan hal-hal yang memang disarankan oleh pemerintah. Kualitas komunikasi publik menjadi salah satu faktor pendukung dalam menguatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan metode *library research* yang dilakukan dengan cara merujuk pada artikel-artikel jurnal, repository, pemberitaan media massa, media sosial dan semua *resource* yang dapat diakses secara online. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan berdasarkan pembahasan dan dikaji satu per satu dan dihubungkan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Seluruh kegiatan pengumpulan data dan analisis dilakukan secara online mengingat keterbatasan gerak secara terbuka di ruang publik. Data diperoleh dengan melakukan kategorisasi masalah yakni merujuk pada sumber-sumber yang tersedia untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi dengan teori, dalam hal ini adalah teori-teori sosiologi komunikasi massa dan teori-teori agama dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun secara khusus pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan sosiologi komunikasi massa dan agama, namun penting pula dikemukakan beberapa konsekuensi teknis sebagai akibat dari tersebarnya wabah di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Salah satu konsekuensi teknis dari keputusan pemerintah untuk melakukan *physical* dan *social distancing* diiringi adalah munculnya anjuran dan kampanye *work from home*, yakni melakukan pekerjaan kantor dari rumah dan hanya keluar rumah jika memang sangat mendesak dan itupun harus menerapkan protokol sesuai anjuran WHO diantaranya tetap mengenakan masker, mencuci tangan secara rutin setelah memegang benda. Selain bekerja, masyarakat juga dianjurkan untuk beribadah dan melakukan aktivitas publik lainnya di rumah.

Tentu saja kondisi ini menyulitkan mereka yang terbiasa bekerja di kantor, sekolah, perguruan tinggi, pabrik dan sebagainya.

Namun demikian, situasi darurat ini kemudian “memaksa” setiap orang untuk tetap berhubungan dengan kolega, mahasiswa, klien, dan pihak-pihak lainnya agar pekerjaan mereka tetap dapat ditunaikan. Keterpaksaan ini yang kemudian menjadikan pola interaksi berbasis teknologi internet menjadi pilihan yang paling rasional. Sejumlah platform internet tiba-tiba menjadi primadona untuk menggantikan interaksi diantara masyarakat sehingga secara signifikan, moda komunikasi digital menjadi arus utama dalam konteks komunikasi mereka.

Secara teoretis, komunikasi digital didefinisikan oleh (Lee & Messerschmitt, (1988: xiii) sebagai “*transport of bit streams from one geographical location to another over various physical media, such as wire pairs, coaxial cable, optical fiber, and radio waves*” Lebih jauh, keduanya memperluas definisi komunikasi digital sebagai komunikasi yang bersifat *multiflexing, multiple access* dan *synchronic* dan dipraktikkan oleh begitu banyak pengguna. Pilihan ini dilakukan oleh karena sifat internet yang hanya telah memangkas “ongkos” komunikasi dan jarak, tetapi juga telah merangkum semua jenis media itu sendiri (Fakhrurroji, 2014, 2017b; Reed, 2019) dan oleh karena itulah disebut dengan *new media* (Fakhrurroji, 2017a, 2019) yang mengantarkan para penggunanya pada budaya komunikasi yang benar-benar berbeda dengan sebelumnya.

Dalam konteks ini, budaya dipahami sebagai cara kita melakukan sesuatu (Mifsud, 2005: 240) atau “*a habitual way or mode of acting*” (Simpson & Weiner, 1989). Lebih jauh, Säljö menjelaskan budaya sebagai sekumpulan gagasan, sikap, pengetahuan dan sumberdaya lain yang diperoleh melalui interaksi dengan siapapun di seluruh dunia, termasuk dengan perangkat dan artefak fisik (dalam Mifsud, 2005: 240). Sebagaimana yang dapat dilihat, teknologi baru dapat merevisi praktik-praktik masa lalu yang secara langsung berimplikasi pada praktik komunikasi dalam konteks-konteks tertentu (Green & Haddon, 2009: 36) Hal ini antara lain disebabkan oleh karakteristik media digital yang mengubah pola engagement penggunaannya (Fakhrurroji, 2019). Dengan kata lain, COVID-19 telah memaksa masyarakat untuk berpartisipasi dalam budaya media yang semakin bersifat digital. Karena sekolah dan kampus ditutup, aktivitas pembelajaran diselenggarakan dengan menggunakan platform internet. Demikian pula dengan rapat-rapat perusahaan yang juga menggunakan internet untuk dapat tetap berkoordinasi dalam suasana terbatas.

1. Perspektif Sosiologi Komunikasi Massa

Kampanye pemerintah agar aktivitas massal di ruang publik dihentikan telah berimplikasi pada berbagai aspek. Tidak mengherankan jika terjadi pro dan kontra sebab bagaimana pun aktivitas sehari-hari harus berjalan sebagai konsekuensi dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Secara psikologis, perbedaan persepsi publik atas kebijakan ini disebabkan oleh empat hal, yakni; *personal* yang mencakup sistem syaraf, hereditas, hormonal dan sebagainya; *situasional* yang mencakup latar belakang pendidikan, sikap politik, ekonomi, budaya, iklim dan sebagainya; *kerangka pikir*; dan *pengalaman sehari-hari* (Rakhmat, 1991). Dengan begitu, pro-kontra adalah sesuatu yang lumrah dalam setiap kebijakan.

Oleh sebab itu, komunikasi publik yang dijalankan oleh Pemerintah hendaknya memperhatikan empat unsur tadi untuk meminimalisir pro-kontra yang muncul di publik. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak hanya mematikan aktivitas sosial, tetapi juga aktivitas ekonomi, terutama di sektor riil. Penutupan sementara puluhan pabrik berakibat pada PHK besar-besaran dan melahirkan ribuan pengangguran baru, sebuah masalah klasik di negara

ini. Persoalan-persoalan ini dapat memicu ketegangan baru sehingga hendaknya komunikasi publik dijalankan dengan baik seraya ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada publik.

Selain itu, kesimpangsiuran informasi terkait penanganan mereka yang terinfeksi atau diduga terinfeksi tidak transparan menyebabkan paranoia di tingkat publik. Kecurigaan dan ketakutan terhadap mereka yang diduga terjangkit virus ini berujung pada penolakan pemakaman oleh warga di beberapa wilayah di Indonesia. Mobil ambulans pembawa jenazah dihadang, dihardik ramai-ramai dan dipaksa kembali ke rumah sakit. Jenazah-jenazah itu manjadi terlantar karena warga khawatir terancam terpapar virus yang sama. Tidak hanya pasien, keluarga korban juga sangat menderita. Mereka diisolasi di rumah sendiri atau di tempat lain 14 hari seolah dikucilkan oleh para tetangga. Hal ini memperlihatkan bahwa pengetahuan warga terkait penyakit ini masih sangat rendah dan hal ini menandakan bahwa sosialisasi pemerintah melalui komunikasi publik tidak berjalan dengan baik.

Dalam perspektif sosiologi komunikasi massa, COVID-19 telah manjadi tragedi masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. Paling tidak, hal ini dapat dilihat dalam tiga hal. *Pertama*, peristiwa wabah sering ditenggarai sebagai sesuatu yang memiliki siklus setiap 100 tahun yang benar-benar telah meluluhlantakkan kehidupan dan hal ini dapat dilihat hampir secara merata di empat benua sekaligus. *Kedua*, wabah ini juga telah membuat masyarakat memaksimalkan teknologi digital untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari. *Ketiga*, berbeda dengan ketika menghadapi perang, semua negara yang terpapar virus corona menunjukkan sikap gagap, terhenyak, terhuyung-huyung tanpa bisa berbuat banyak seperti yang sangat diharapkan oleh masyarakat, terlebih oleh para korban dan keluarganya.

Dalam konteks Indonesia, boleh jadi ketidaksempurnaan komunikasi publik yang dijalankan oleh Pemerintah disebabkan pula oleh berbagai hal, terutama maraknya informasi berbagai versi yang tersebar di media sosial, termasuk informasi yang tidak terkonfirmasi kebenarannya alias *hoax*. Melalui media sosial, publik menerima berbagai informasi terkait rumor, dugaan, spekulasi tentang segala hal yang berhubungan dengan COVID-19. Namun, kesimpangsiuran informasi ini semestinya disadari sejak awal oleh pemerintah seraya segera melakukan counter dengan menyampaikan informasi detail kepada publik.

Dalam perspektif sosiologi komunikasi massa, pencegahan dan penanganan pemerintah Indonesia atas virus ini sudah bermasalah sejak awal. Para pejabat pada tingkat kementerian hingga kepala daerah tidak memiliki persepsi dan visi yang sama tentang ancaman virus ini. Bahkan sebagian pejabat pemerintah beranggapan bahwa Indonesia aman dari virus ini dan sebagian lainnya berpendapat berbeda. Pandangan dan sikap yang terpolarisasi di tingkat pemerintah ini pada akhirnya berakibat pada pandangan dan sikap masyarakat yang manjadi terbelah dan terpecah-pecah pula (Sumadiria, 2014). Tidak heran jika hingga hari ini masih banyak masyarakat yang tidak patuh dengan himbauan untuk *social* dan *physical distancing*. Dalam tinjauan sosiologi komunikasi massa, media yang seharusnya melahirkan efek fungsional, malah justru berubah menimbulkan efek disfungsional (Baran, 2006; Sumadiria, 2014). Publik tidak memiliki kesamaan pandangan dan sikap, sehingga kemudian bertindak sendiri-sendiri dan hal ini disebabkan oleh strategi komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terlihat tanpa arah. Tida heran jika masyarakat lebih meyakini apa yang diyakininya melalui informasi yang mereka terima di media sosial.

Menyusul kebijakan PSBB, berbagai paket bantuan langsung sebagai stimulus ekonomi kepada warga yang terdampak corona. Namun di lapangan ternyata menimbulkan banyak masalah dimana data warga miskin dan warga yang terdampak yang dimiliki pemerintah desa atau kelurahan, sangat berlainan dengan data yang dimiliki pihak pemerintah daerah atau provinsi. Paket bantuan sembako dan bantuan tunai yang seharusnya menenangkan masyarakat

malah berubah menjadi pemantik gelombang keresahan baru. Pada saat yang hampir bersamaan pula, kartu prakerja dengan anggaran Rp 20 triliun tetap digulirkan meski dikecam berbagai pihak karena dianggap tidak efektif dan hanya menambah defisit keuangan negara di tengah persoalan pandemi ini.

Kinerja Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di tingkat Nasional setiap saat hanya mengumumkan jumlah korban yang terinfeksi corona tanpa menyampaikan perkembangan positif yang dapat menenangkan publik. Dalam pandangan sosiologi komunikasi massa, hal ini berakibat pada ketakutan hebat dan paranoia massal di tingkat publik. Lebih jauh, hal ini berdampak pada sikap dan perilaku destruktif. Secara vertikal, sejumlah warga menolak dan memperlihatkan pembangkangan terhadap kebijakan-kebijakandan anjuran-anjuran pemerintah terkait penanggulangan corona. Secara horizontal, masyarakat menularkan sikap saling tidak percaya dan saling curiga seperti dilihat dalam kasus-kasus pengusiran warga terhadap para tenaga kesehatan yang bermukim di wilayah mereka. Jadi, pada tataran horizontal, persoalan ini tak lagi sebatas pada penanggulangan corona, melainkan sudah pada fase munculnya disharmoni dan konflik sosial.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang semakin meluas dan diperpanjang durasinya dapat meningkatkan kecemasan sosial. Kecemasan ini ditandai paling tidak dalam tiga hal. *Pertama*, kecemasan karena tidak memperoleh kepastian kapan penyebaran virus corona dapat diatasi. *Kedua*, kecemasan mengenai masa depan kehidupan karena ancaman kehilangan pekerjaan dan sumber mata pencaharian akibat kebijakan PSBB, penguncian wilayah, dan karantina sosial. *Ketiga*, terlalu lama berdiam di rumah tanpa aktivitas dan tanpa pekerjaan jelas, hanya akan melahirkan berbagai tekanan psikis yang berakibat buruk bagi keluarga, rumah tangga dan lingkungan sekitar.

Kebijakan komunikasi publik dengan visi yang tidak terarah serta terukur dari pihak pemerintah telah memicu gelombang frustrasi sosial di kalangan masyarakat lapisan menengah dan bawah (Bandura, 1977; Sanderson, 1991). Secara teoretis, berbagai teori lama tentang kedahsyatan efek komunikasi massa (Baran, 2006; Sumadiria, 2016), dan sekarang komunikasi melalui media sosial, seolah menyeruak kembali secara mengejutkan. Fenomena ini harus segera diakhiri, baik secara struktural maupun secara horizontal. Secara struktural, dimulai dari aparatur negara dari level tertinggi sampai dengan level terbawah. Secara horizontal, publik perlu mendapat sosialisasi, edukasi, komunikasi, dan koordinasi yang terintegrasi sehingga semua pihak berada dalam satu sikap, satu tujuan, dan satu bahasa dalam pencegahan dan penanggulangan virus corona di Indonesia.

Memang harus disadari bahwa ongkos sosial ekonomi dari berbagai kebijakan pencegahan dan penanggulangan corona di Indonesia dalam dua bulan terakhir ini saja telah menghabiskan triliunan rupiah karena sangat penting. Namun, menata kembali pranata sosial budaya yang berkeadaban, berkeadilan, dan berpengharapan, juga tidak kalah penting. Sebab dampak COVID-19 tak hanya pada kehilangan nyawa manusia, tetapi juga mengancam hilangnya denyut sosial ekonomi negara dan masyarakat secara keseluruhan yang berujung pada lenyapnya kemanusiaan.

2. Perspektif Agama

Perspektif lain yang juga digunakan dalam tulisan ini adalah perspektif agama. Bagaimanapun bagi masyarakat Indonesia, agama adalah sumber nilai paling tinggi yang dipandang mampu memberikan pengharapan dalam kondisi sulit, termasuk dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Agama menjadi penting dalam menghadapi bencana pandemi dan bencana lainnya, sebab pada dasarnya bencana merupakan bahaya yang dihadapi oleh individu

atau masyarakat yang melebihi kemampuan individu atau masyarakat untuk meresponsnya (Coppola and Maloney, 2009: 48). Karena ketidakmampuan ini, mereka membutuhkan pihak lain untuk memberikan bantuan. Dalam konteks Indonesia, COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional, bahkan WHO telah mentapkannya sebagai *global pandemic*, artinya berlaku di seluruh dunia sehingga memerlukan memerlukan intervensi, respons serta bantuan dari berbagai lembaga internasional (Coppola and Maloney, 2009: 49).

Secara teoretik, bencana diukur dari segi nyawa yang hilang, cedera yang diderita, properti rusak atau hilang, dan degradasi lingkungan. Intinya bencana sangat tidak diharapkan oleh manusia, tetapi hal itu sesuatu yang sering terjadi dan harus dihadapi oleh manusia. Oleh sebab beberapa pakar agama melihat bahwa agama seringkali lahir dari kondisi ketakutan dan kekhawatiran yang dialaminya (Kahmad, 2002: 27), seperti takut akan kematian, kelaparan, kekurangan, khawatir akan hal-hal buruk dan sebagainya. Namun, agama pun lahir dari ketidakberdayaan manusia atas kondisi sulit yang dialaminya (Kahmad, 2002: 26). Pandemi global COVID-19 ini sangat mengancam dan mempengaruhi kehidupan manusia ini menyadarkan sebagian besar orang akan arti penting agama (Super and Turley, 2006: 1).

Namun sebagaimana diyakini oleh umat Islam, Tuhan tidak akan membebani umatnya di luar kapasitas dirinya (QS. 2: 286). Wabah dalam literatur berbagai agama, khususnya Islam, seringkali dikaitkan dengan peringatan atau ujian terhadap manusia agar manusia kembali menyucikan diri dan membersihkan jiwa. Wabah seolah memberikan peringatan bahwa pencapaian manusia yang demikian hebatnya menjadi tidak berarti berhadapan dengan sesuatu yang ukurannya bahkan tidak terlihat oleh mata telanjang. Dalam pandangan agama, Tuhan telah berjanji akan akan memberikan ujian kepada manusia berupa ketakutan, kelaparan, berkurangnya kekayaan bahkan sampai hilangnya jiwa atau kematian. Kesadaran agama dalam menghadapi wabah COVID-19 ini akan membantu manusia untuk tetap optimis seraya bersabar dengan yang dihadapinya dengan tetap melakukan upaya yang terbaik.

Dalam sejarah Islam awal, peristiwa wabah dikaitkan dengan munculnya siklus wabah di Timur Tengah setelah Wabah Justinian pada tahun 541 M. Hal tersebut didasarkan pada risalah wabah Arab yang ditulis setelah Wabah *Black Death*, pandemi wabah kedua pada pertengahan abad keempatbelas (Emmeluth, 2005: 12). Pada periode Umayyah, wabah-wabah tersebut memicu penjelasan medis, agama, hukum serta pengobatan, sehingga sangat mempengaruhi sikap dan perilaku umat Muslim terhadap penyakit. Kajian terkait wabah, salah satunya ditulis oleh Ibn Abi Hajalah pada tahun 1362 M. Sebelumnya, hakim kepala Damaskus selama Kematian Hitam menceritakan wabah tersebut pada masa Islam awal. Namun risalah paling komprehensif dan terbaik yang ditulis pada Abad Pertengahan adalah dua ringkasan sejarah epidemi wabah oleh As-Suyuti (w. 1505 M) dalam bukunya *Ma rawahu l-wa'un fi akhbar af-ta'un*. Ringkasan As-Suyuti kemudian membentuk dasar kajian penting Alfred von Kremer tentang epidemi (Dols, 1974: 374).

Peristiwa-peristiwa di sekitar wabah menjadi penting karena menunjukkan sikap Muslim sementara dan secara langsung mempengaruhi interpretasi agama dan hukum serta wabah itu sendiri. Tiga prinsip yang berasal dari ajaran Nabi mempengaruhi umat Muslim awal ketika mereka menghadapi penyakit ini: (1) wabah adalah rahmat dan kemartiran dari Tuhan untuk Muslim yang taat dan hukuman untuk orang kafir; (2) seorang Muslim tidak boleh masuk atau lari dari tanah yang dilanda wabah; dan (3) tidak ada kontroversi wabah, karena penyakit datang langsung dari Tuhan (Dols, 1974: 379). Ketiga prinsip religius-legal ini memicu kontroversi yang berkelanjutan karena munculnya epidemi wabah.

Sejumlah metode dasar dan efektif dalam pencegahan wabah adalah vaksinasi atau penggunaan antibiotik. Di masa lalu, banyak jenis obat yang sama yang dianggap berguna dalam mengobati wabah kadangkala digunakan untuk mencegahnya. Sesuai dengan keyakinan

bahwa penyakit itu menyebar melalui udara, banyak tindakan pencegahan yang melibatkan bau. Diperkirakan bahwa jika seseorang membawa bunga atau memakai parfum yang kuat, baunya akan membantu mencegah penyakit. Orang-orang juga percaya membawa jimat keberuntungan bisa menangkal penyakit, meskipun tidak terkonfirmasi. Setelah tahun 1350, pasien wabah dikarantina di sebuah rumah yang agak jauh dari penduduk. Kapal-kapal yang datang dari daerah yang terserang wabah dikarantina selama 40 hari hingga penyakit itu bisa mati (Emmeluth, 2005: 64). Di sisi lain banyak pula penelitian yang menunjukkan bahwa keyakinan dan praktik keagamaan/spiritual umumnya digunakan baik oleh pasien medis maupun psikiatrik untuk mengatasi wabah penyakit (Koenig, 2012).

Selanjutnya, agama khususnya Islam memberikan pandangan bagaimana memberikan informasi mengenai suatu wabah, kegentingan atau kesulitan lainnya. Ada strategi komunikasi yang dilakukan Rasulullah saat Perang *Badr* pada tahun kedua Hijriyah misalnya (Yatim, 1993). Setelah selesai perang, muncul isu tidak menyenangkan bagi muslim Madinah bahwa kaum muslimin telah kalah dan Rasul meninggal. Dengan kecerdasannya, Rasulullah lalu mengirimkan dua sahabatnya untuk segera mengabarkan yang sesungguhnya bahwa kemenangan diraih oleh kaum muslimin dan Rasulullah selamat. Hal ini dilakukan oleh Rasul untuk menggembirakan kaum muslimin, dengan dasar memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin khususnya dan manusia secara umum, sekecil apapun, menjadi amal yang terbaik dan paling dicintai dalam Islam.

Strategi lainnya, kasus terjadi ketika kaum muslimin sedang mempersiapkan Perang *Khandaq* di tahun kelima Hijriyah (Yatim, 1993). Saat itu terhembus kabar bahwa kaum Yahudi dari Bani Quraidzah mendukung rencana penyerangan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Kabar buruk lainnya, di Madinah terjadi wabah penyakit dan kelaparan sehingga membuat khawatir para sahabat akan keluarga yang mereka tinggalkan. Lalu Nabi Saw. mengutus empat sahabat terpilih untuk mencari informasi yang sebenarnya. Rasul berpesan kepada empat utusan ini: "Jika isu ini benar, maka sampaikan kepadaku cukup bahasa isyarat, tapi apabila isu tersebut tidak benar, maka kabarkan secara terbuka untuk memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada kaum muslimin yang sedang berjihad dalam peperangan.

Kedua contoh di atas memperlihatkan bahwa komunikasi publik begitu signifikan dan berdampak pada perilaku masyarakat. Sebagai pemangku kebijakan, strategi komunikasi publik masih terkesan tidak searah dan berakibat pada ketidakpatuhan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Pandangan agama telah jelas melihat bahwa wabah adalah sesuatu yang datang dari Allah, tetapi pemerintah hendaknya tidak menganjurkan "berdoa" tanpa memperlihatkan upaya optimal dalam penanggulangan wabah ini. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan beragama pun menjadi salah satu unsur yang mengalami perubahan akibat wabah COVID-19 ini karena aktivitas keagamaan di ruang publik menjadi dilarang untuk penyebarannya. Kebijakan ini tentu tidak akan berjalan dengan baik jika pemerintah tidak bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama untuk meyakinkan publik. Dengan demikian, untuk menghindari kesenjangan yang lebih dalam di tingkat publik, strategi komunikasi publik dalam penanganan COVID-19 harus semakin kuat dan dapat diandalkan sehingga Indonesia segera dapat keluar dari wabah yang tidak hanya menyeret kita kedalam krisis ekonomi, tetapi juga krisis kemanusiaan.

KESIMPULAN

Perlu diakui bahwa COVID-19 tidak hanya dihadapi di negeri ini, ia adalah pandemi global yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Namun, beberapa negara telah berangsur pulih, bahkan beberapa negara tetangga telah mencabut status *lockdown* sehingga warganya bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dalam perspektif sosiologi komunikasi massa,

keberhasilan mereka dalam keluar dari krisis wabah ini salah satunya didukung oleh keberhasilan strategi komunikasi publik dalam mengungkap, melacak dan memetakan penyebaran wabah ini dengan cepat seraya memberikan sosialisasi yang cukup terhadap warganya. Ketika negara-negara tetangga telah terjangkit, Indonesia mengklaim diri sebagai satu-satunya negara yang tidak terinfeksi. Dalam perspektif komunikasi publik, tentu hal ini adalah sesuatu yang gegabah, terlebih WHO telah menetapkannya sebagai pandemi global, artinya setiap negara harus menjalankan protokol yang dianjurkan WHO.

Publik kemudian dihadapkan dengan kesimpangsiuran informasi terkait wabah ini, ditambah lagi dengan kampanye jamu sebagai obat penangkal virus ini—sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan mereka tidak waspada dengan penularan wabah ini. Pada saat yang sama, statemen pemerintah melalui Menteri Kesehatan juga banyak mengalami revisi sehingga menimbulkan kebingungan publik. Akibatnya, ketika pemerintah menyatakan kondisi darurat wabah, masyarakat banyak yang mengabaikan, terlebih lagi, pemerintah belum memberikan solusi praktis bagi mereka jika harus tinggal di rumah dalam waktu yang lama karena mereka didesak dengan kebutuhan sehari-hari.

Dalam perspektif agama, wabah memang diyakini sebagai ujian bagi manusia. Namun hal ini tidak berarti bahwa manusia hanya bisa pasrah, akan tetapi tetap berusaha untuk, bisa keluar dari wabah tersebut. Lebih dari itu, wabah juga bisa menjadi sumber ilmu untuk dikaji sebagai pengetahuan baru yang bermanfaat bagi manusia. Lebih jauh, informasi mengenai wabah dalam suatu masyarakat merupakan tanggungjawab penguasa wilayah tersebut. dengan kata lain, keterbukaan informasi terkait wabah menjadi kunci bagi penghuni wilayah tersebut sehingga informasi yang disampaikan hendaknya memberikan solusi praktis, alih-alih menambah permasalahan baru yang dapat memperburuk kondisi masyarakat. Oleh sebab itu, strategi komunikasi publik yang tidak sistematis dan linier diantara sesama pejabat pemerintah hanya akan berakibat pada ketidakpatuhan masyarakat dalam skala yang lebih luas, termasuk dalam kehidupan beragama dimana sebagian orang masih beribadah di rumah ibadah padahal telah diperingatkan akan ancaman penyebaran wabah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, F., Zviedrite, N., & Uzicanin, A. (2018). Effectiveness of Workplace Social Distancing Measures in Reducing Influenza Transmission: A Systematic Review. *BMC Pub Health*, 18(518).
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. New Jersey: Printice-Hall.
- Baran, S. J. (2006). *Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture* (4th Editio). New York: McGraw Hill Companies.
- Coppola, D. P., & Maloney, E. K. (2009). *Communicating Emergency Preparedness, Strategies for Creating a Disaster Resilient Public*. Taylor & Francis Group: CRC Press.
- Dols, M. W. (1974). Plague In Early Islamic History. *Journal of the American Oriental Society*, 94(3).
- Elston, D. M. (2020). The Coronavirus (COVID-19) Pandemic and Patient Safety. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 82(4), 819–820.

- Emmeluth, D. (2005). *Plague*. Philadelphia: Chelsea House Publisher.
- Fakhruroji, M. (2014). *Agama dalam Pesan Pendek: Mediatisasi dan Komodifikasi Agama dalam SMS Tauhiid*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fakhruroji, M. (2017a). *Dakwah di Era Media Baru: Teori dan Aktivisme Dakwah di Internet*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Fakhruroji, M. (2017b). Mediatization of religion in “texting culture”: self-help religion and the shifting of religious authority. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 5(2), 231. <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i2.231-254>
- Fakhruroji, M. (2019). Digitalizing Islamic lectures: Islamic apps and religious engagement in contemporary Indonesia. *Contemporary Islam*, 13(2), 201–215. <https://doi.org/10.1007/s11562-018-0427-9>
- Gallego, V., Nishiura, H., Sah, R., & Rodriguez-Morales, A. J. (2020). The COVID-19 Outbreak and Implications for the Tokyo 2020 Summer Olympic Games. *Journal of Travel Medicine and Infectious Disease*.
- Glass, R. J., Glass, L. M., Beyeler, W. E., & Min, H. J. (2016). Targeted Social Distancing Designs for Pandemic Influenza. *Emergence Infectious Disease*, 12.
- Green, N., & Haddon, L. (2009). *Mobile Communications*. Oxford, UK and New York, NY: Berg.
- Hardman, L. (2010). *Plague: Diseases and Disorders*. New York: Gale, Cengage Learning.
- Kahmad, D. (2002). *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koenig, H. G. (2012). Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications. *Journal ISRN Psychiatry*.
- Lee, E. A., & Messerschmitt, D. G. (1988). *Digital Communication*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Lin, Q., Zhao, S., Gao, D., Lou, Y., Yang, S., Musa, S. S., ... He, D. (2020). A Conceptual Model for the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in Wuhan, China with Individual Reaction and Governmental Action. *International Journal of Infectious Diseases*, 93, 211–216.
- Lu, C. W., Liu, X. F., & Jia, Z. F. (2020). 2019-nCoV Transmission through the Ocular Surface Must Not be Ignored. *Lancet*.
- Mifsud, L. (2005). Changing Learning and Teaching Cultures? In R. Ling & P. E. Pedersen (Eds.), *Mobile Communications: Re-negotiation of the Social Sphere* (pp. 237–252). London: Springer-Verlag.
- Rakhmat, J. (1991). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Razai, M. S., Doerholt, K., Ladhani, S., & Oakeshott, P. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Guide for UK GPs. *The BMJ*, 368.

- Reed, T. V. (2019). *Digitized Lives: Culture, Power and Social Change in the Internet Era* (2nd Editio). New York: Routledge.
- Roosa, K., Lee, Y., Luo, R., Kirpich, A., Rothenberg, R., Hyman, J. M., ... Chowell, G. (2020). Real-time Forecasts of the COVID-19 Pandemic in China from February 5th to February 24th. *Infectious Disease Modelling*, 5, 256–263.
- Sanderson, S. K. (1991). *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* (Translated). Jakarta: Rajawali Pers.
- Simpson, J. A., & Weiner, E. S. C. (1989). *The Oxford English Dictionary* (2nd Editio). Oxford: Clarendon Press.
- Sumadiria, A. H. (2014). *Sosiologi Komunikasi Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sumadiria, A. H. (2016). *Hukum dan Etika Media Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Super, J. C., & Turley, B. K. (2006). *Religion in World History*. New York: Routledge.
- Wilder-Smith, A., & Freedman, D. O. (2020). Isolation, Quarantine, Social Distancing and Community Containment: Pivotal Role for Old-style Public Health Measures in the Novel Coronavirus (2019-nCoV) Outbreak. *Journal of Travel Medicine and Infectious Disease*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1093/jtm/taaa020>
- Yatim, B. (1993). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zhang, L., & Liu, Y. (2020). Potential Interventions for Novel Coronavirus in China: A Systematic Review. *Journal of Medical Virology*.